

MANAJEMEN PEMERINTAHAN PADA PROGRAM *MAMANGUN TUNTANG MAHAGA LEWU* (MEMBANGUN DAN MEMELIHARA DESA) DI KELURAHAN PAHANDUT SEBERANG KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2011

Ricky Zulfauzan

ABSTRAK

Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) adalah program terobosan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya program ini masih belum berjalan maksimal dikarenakan beberapa masalah seperti program yang tidak tepat sasaran, kurang bermanfaat dan termanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Maka dari itu dirumuskan masalah utama sebagai berikut: 1). Bagaimana Manajemen Pemerintahan dalam Program *Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu*? dan 2). Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Program *Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu*?

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Program *Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu* Rencana Aksi Pemerintah Kota Palangka Raya Program Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di Kelurahan Pahandut Seberang Tahun Anggaran 2011 belum maksimal karena bermasalah sejak dari perencanaan. Masalah itu antara lain: perencanaan bersifat politis; perencanaan lebih dominan *top down* dan disusun diatas meja tanpa survey lapangan yang komprehensif. Pengorganisasian Sumber-sumber Pemerintahan dikeluhkan kurangnya koordinasi dan keterpaduan antar pelaku. Penggunaan Sumber-sumber Pemerintahan dikeluhkan kurang kuatnya asas legalitas PM2L karena hanya didasari pada Peraturan Gubernur. Kontrol Pemerintahan berjalan cukup baik karena faktor jarak Kelurahan Pahandut Seberang yang tidak terlalu jauh dengan Kota Palangka Raya.

Disarankan agar 1). Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap daerah hendaknya disikapi dengan bijaksana yaitu dengan mengembangkan kemampuan dan kreatifitas Daerah dalam memberdayakan masyarakatnya; 2). Manajemen Pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, artinya apabila perencanaan berjalan baik maka fungsi manajemen yang lain akan mengiringi.; 3). Demi kepentingan yang lebih besar yaitu mensejahterakan masyarakat hendaknya Program PM2L dipisahkan dari kepentingan politik dan golongan apapun; 4). Lemahnya koordinasi harus disikapi dengan lebih aktifnya para pelaku kerja PM2L mencari informasi dan melaporkan kepada tim evaluasi apabila memang dirasa perlu.; 5). program PM2L diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah, karena apabila tidak dibuat maka setelah Gubernur berganti maka program ini dengan sendirinya akan berakhir pula. Padahal program PM2L sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kalimantan Tengah.

Kata Kunci : Program, *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu*, Pemberdayaan.

1. Latar Belakang Masalah

Program *Mamangun tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) adalah program pemberdayaan masyarakat agar terentaskan dari kemiskinan dengan sasaran program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) adalah menurunkan status desa-desa tertinggal setiap tahunnya sehingga sejajar dengan desa lainnya. Sekaligus mewujudkan desa per-

contohan yang mampu melaksanakan pembangunan secara mandiri dan berkelanjutan, terutama dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Sedangkan sasaran utamanya adalah menurunkan jumlah desa tertinggal 3 desa per kabupaten atau kota per tahun, 42 desa/Kelurahan per tahun. (Borneo News, Senin 11 April 2011).

Studi yang dilakukan BPS, UNDP dan UNSFIR menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada periode 1996-1998, meningkat dengan tajam dari 22,5 juta jiwa (11,3%) menjadi 49,5 juta jiwa (24,2%) atau bertambah sebanyak 27,0 juta jiwa (12,9%) (BPS,1999). Sementara itu, *International Labour Organisation* (ILO) memperkirakan jumlah orang miskin di Indonesia pada Akhir tahun 1999 mencapai 129,6 juta jiwa atau sekitar 66,3% dari seluruh jumlah penduduk.

Data dari BPS tahun 1999 itu juga memperlihatkan bahwa selama periode 1996-1998, telah terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin secara hampir sama di wilayah pedesaan dan perkotaan yaitu menjadi sebesar 62,72% untuk wilayah pedesaan dan 61,1% untuk wilayah perkotaan. Secara agregat presentasi peningkatan penduduk miskin terhadap total populasi memang lebih besar di wilayah pedesaan (7,78%) dibandingkan dengan di Perkotaan (4,72%).

Sedangkan data terbaru yang dirilis oleh BPS berdasarkan hasil sensus penduduk, jumlah penduduk miskin 2010 mencapai 31,02 juta jiwa (BPS, 2010). Badan Pusat Statistik (BPS) menegaskan angka penduduk miskin di Indonesia sejak tahun 2006 terus menurun meski jumlah penduduk hampir miskin juga besar. "Sejak 2006, data penduduk miskin turun dari 39,3 juta menjadi 31,02 juta dengan memakai garis kemiskinan, yaitu garis kemiskinan makanan dan non-makanan (kemiskinan absolut).

Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 1,5 kali dari luas pulau Jawa atau 153.564 km², memiliki jumlah penduduk lebih kurang 2,027 juta jiwa, terdiri dari 13 Kabupaten dan 1 Kota (dimana 7 diantaranya adalah Kabupaten tertinggal), 107 Kecamatan dan 1.356 Desa/Kelurahan. Dari 1.356 Desa/Kelurahan tersebut 978 Desa/Kelurahan (72,12%) merupakan Desa/Kelurahan tertinggal yang menyebar hampir merata di semua kabupaten/kota dimana 486

Desa/Kelurahan diantaranya berada di Kabupaten bukan tertinggal (pedoman umum PM2L, 2008).

Program PM2L adalah terobosan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dimana pendekatan utama yang dilakukan adalah mensinergiskan dan memfokuskan seluruh sumber daya yang ada pada Desa percontohan yang dipilih. Artinya program PM2L adalah program yang mensinergiskan dan memfokuskan setiap sumberdaya yang ada di Desa percontohan terpilih dengan menggunakan mekanisme perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi dari dan untuk warga Desa itu sendiri.

Berdasarkan Pedoman Umum PM2L yang diterbitkan oleh pemerintah provinsi Provinsi Kalimantan Tengah disebutkan ada 5 (lima) program prioritas dalam PM2L yaitu : 1) pembangunan prasarana dasar (jalan, listrik, air bersih, telekomunikasi dan sebagainya); 2) Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan; 3) peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan; 4) pemberdayaan ekonomi rakyat (pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, pariwisata dan lain-lain); 5) pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Dari ke- 5 program prioritas di atas penulis cukup tertarik untuk memfokuskan penelitian ini pada program prioritas yang ke- 4, yaitu : pemberdayaan ekonomi rakyat, karena pemberdayaan ekonomi rakyat langsung menyentuh akar permasalahan kemiskinan.

Desa yang direncanakan menjadi lokasi program PM2L tahun 2011 adalah Desa yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur No 188.44/23/2011 tentang Penetapan Desa/Kelurahan dan Desa Percontohan PM2L Di Provinsi Kalimantan Tengah. Sementara itu program tersebut tahun 2008, 2009 dan 2010 yang sudah dilaksanakan hampir diseluruh Kabupaten tergolong sukses, tidak saja dilihat dari pembangunan, tapi juga partisipasi masyarakat Desa serta peningkatan sosial ekonomi mereka.

Sejak program PM2L digulirkan pada tahun 2008 angka kemiskinan di Kabupaten Sukamara semakin menurun. Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sukamara, angka kemiskinan tahun ini sebesar 4,5% atau turun 1,41% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,91%. (Borneo News 22 Desember 2010).

Disadari atau tidak suatu program pemberdayaan masyarakat tidak akan pernah sempurna, pasti saja ada permasalahan yang dihadapi. Baik itu berupa tantangan maupun kendala yang harus dicarikan solusi bersama agar pelaksanaan program ini jadi lebih baik lagi kedepannya.

Walter S. Penyang (anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah) mengatakan "bantuan-bantuan kerakyatan agar lebih selektif dan diprioritaskan yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat". Selanjutnya Penyang menambahkan di Kabupaten Murung Raya Kecamatan Tanah Siang ada salah satu Desa dimana program ekonomi rakyat dengan kegiatan berupa penyebaran bibit rambutan, pupuk organik dan diklat akuntansi koperasi bagi bendahara koperasi dibiayai oleh program PM2L dari Pemerintah Provinsi Kalteng tapi juga dibiayai oleh program PNPM-MP".

Ini menunjukkan lemahnya koordinasi antar-pemerintahan. Selain itu program apapun tidak mungkin akan berjalan efektif apabila ada unsur-unsur politis. Suatu program akan efektif apabila mentaati azas keterpaduan dan integrasi. Dimana konsep Manajemen Pemerintahan berperan sentral dalam aplikasi programnya (Borneo News, Sabtu 9 April 2010).

Menurut Ndraha (2003) ruang lingkup Manajemen Pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi manajemen yaitu : (1) Perencanaan Pemerintahan; (2) Pengorganisasian sumber-sumber Pemerintahan; (3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan; (4) Kontrol Pemerintahan. Kontrol pemerintahan

dilakukan semenjak pelaksanaan (*Actuating*) dijalankan.

Terry (1988) menyatakan prinsip dasar manajemen terdiri dari Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), Pelaksanaan (*Actuating*) dan Pengawasan (*Controlling*).

Berdasarkan pendapat pakar diatas dapat dinyatakan bahwa program *Mamangun Tuntang Mabaga Lewu* akan efektif apabila dilakukan dengan berpedoman pada azas keterpaduan dan integrasi yang bersumber dari prinsip-prinsip dasar Manajemen Pemerintahan sebagai berikut : (1) Perencanaan pemerintahan secara terpadu dan integratif; (2) Pengorganisasian sumber-sumber Pemerintahan secara terpadu dan integratif; (3) Penggunaan sumber-sumber pemerintahan secara terkoordinasi yang terpadu dan integratif; dan (4) Kontrol Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka penelitian tentang "Manajemen Pemerintahan Pada Program *Mamangun Tuntang Mabaga Lewu* (Membangun dan Memelihara Desa) Di Kelurahan Pahandut Seberang Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011" perlu dilakukan. Selain itu sejauh ini belum ada penelitian mengenai Program *Mamangun Tuntang Mabaga Lewu* di Kota Palangka Raya yang dipublikasikan.

2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan penelitian, yang jawabannya dicari melalui penelitian. Rumusan masalah ini merupakan panduan awal bagi peneliti untuk penjelajahan pada objek yang diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah dan fokus penelitian yang dipaparkan tersebut selanjutnya dibuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Manajemen Pemerintahan dalam Program *Mamangun Tuntang Tuntang Mabaga Lewu* ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Program

Mamangun Tuntang Tuntang Mahaga Lewu ?

3. Tinjauan Pustaka

Konsep Manajemen Pemerintahan

Berbicara mengenai Manajemen Pemerintahan, berarti ada dua ilmu yakni Manajemen dan Pemerintahan. Penggabungan dua ilmu ini, melahirkan Manajemen Pemerintahan. Menurut Suprianto (2009) Manajemen Pemerintahan adalah suatu proses kegiatan melakukan “tata kelola” atau pengelolaan pemerintahan oleh Penguasa atau penyelenggara pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan, yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Makna dari pengertian itu ada tiga yaitu : 1) Adanya suatu kegiatan yang dilakukan; 2) kegiatan pengelolaan pemerintahan; 3) Adanya tujuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Menurut Ndraha (2003) ruang lingkup manajemen pemerintahan terlihat melalui fungsi-fungsi Manajemen: 1) Perencanaan Pemerintahan; 2) Pengorganisasian sumber-sumber Pemerintahan; 3) Penggunaan sumber-sumber Pemerintahan; dan 4) Kontrol Pemerintahan.

Perencanaan Dalam Manajemen Pemerintahan

Perencanaan adalah proses dasar dimana Manajemen Pemerintahan memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Perencanaan dalam Manajemen Pemerintahan adalah esensial, karena fungsi-fungsi Manajemen lainnya seperti pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan (kontrol) sebenarnya hanya melaksanakan keputusan-keputusan dari perencanaan.

Dalam Bukunya yang berjudul “Manajemen” Handoko (2003) membagi perencanaan kedalam dua tipe utama yaitu: (1) perencanaan strategik (*strategic plans*), dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasional yang lebih

luas atau mengimplemetasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan suatu organisasi; dan (2) perencanaan operasional yang mengurai lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai.

Menurut Handoko (2003) pula secara umum kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui empat tahap : 1) menetapkan tujuan dan serangkaian tujuan; 2) merumuskan keadaan saat ini; 3) mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan; 4) mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapain tujuan.

Perencanaan adalah satu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, tetapi rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Oleh karena itu perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi baru secepat mungkin.

Menurut Handoko (2003) ada 2 (dua) alasan dasar perlunya perencanaan dilakukan yaitu untuk mencapai : 1) *protective benefit* yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan; 2) *positive benefit* dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian organisasi.

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas perencanaan yaitu : 1) kegunaan; 2) ketepatan dan objektivitas; 3) ruang lingkup; 4) efektivitas biaya; 5) akutabilitas; dan 6) ketepatan waktu Handoko (2003).

Dari ke-6 kriteria tersebut penulis menilai yang paling tepat untuk mengukur efektivitas dari perencanaan program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu adalah: 1) kegunaan perencanaan, sejauh mana perencanaan ini berdayaguna dalam pelaksanaan program PM2L; 2) ketepatan dan objektivitas perencanaan PM2L; 3) Akutabilitas, ada dua aspek akutabilitas perencanaan

PM2L yaitu tanggung jawab atas pelaksanaan perencanaan dan tanggung jawab atas implementasi rencana itu sendiri.

Penulis hanya memilih ke-3 kriteria diatas bukan berarti ke-3 kriteria lainnya tidak penting. Ke-6 kriteria itu sama pentingnya, namun untuk kebutuhan tulisan ini penulis merasa cukup menggunakan ke-3 kriteria itu saja karena sudah mencakup keseluruhan dari ke-6 kriteria mengukur efektivitas perencanaan menurut Handoko di atas.

Salah satu aspek penting dari perencanaan pemerintahan adalah pembuatan keputusan. Dimana keputusan-keputusan penting harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan.

Dalam program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) aspek perencanaan sangatlah penting. Karena tanpa perencanaan yang baik maka akan sulit bagi pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam setiap tahapan program. Selain itu juga memudahkan dalam melakukan koordinasi antar berbagai bagian organisasi serta meminimalisir pekerjaan yang tidak pasti dan sia-sia.

Input dari perencanaan pemerintahan berasal dari informasi dan aspirasi masyarakat. Sedangkan output yang dihasilkan adalah sebuah rencana target dari kegiatan itu (Ndraha, 2003).

Pengorganisasian Sumber-Sumber Pemerintahan

Pengorganisasian (*organizing*) merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumberdaya-sumberdaya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupinya (Handoko,2003). Struktur organisasi itu sendiri mengandung unsur-unsur seperti : 1) spesialisasi kegiatan; 2) standarisasi kegiatan; 3) koordinasi kegiatan; 4) sentralisasi dan desentralisasi dalam pembuatan keputusan; dan 5) ukuran satuan kerja.

Input yang dijadikan acuan dalam penyusunan struktur organisasi pemerintahan adalah rencana target, dan yang menjadi outputnya adalah

organisasi sumberdaya. Suatu sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya barang sebelum digunakan harus diorganisasikan terlebih dahulu agar siap pakai contoh: sumber daya *waktu*, setelah diorganisasikan akan menjadi *jadwal* kegiatan, sumber daya *uang* setelah diorganisasikan akan menjadi susunan *anggaran* dan lain-lain.

Dalam rangka memantapkan Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) di Provinsi Kalimantan Tengah perlu ditingkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas pelaku dan melibatkan banyak pihak baik Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan dan masyarakat sehingga menjadi satu kegiatan yang terpadu (pedoman umum PM2L,2008).

Penggunaan Sumber-Sumber Pemerintahan

Pelaksanaan dalam penggunaan sumber-sumber pemerintahan memiliki berbagai subfungsi, seperti komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan (Ndraha,2003). *Actuating* yang efektif memerlukan komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan yang baik. Untuk mencapai tujuan dari organisasi dan menjamin kesesuaian antara target dengan hasil yang ingin dicapai maka perlu adanya tiga komponen tersebut.

Input dari pelaksanaan dan penggunaan sumber-sumber pemerintahan ini adalah organisasi sumberdaya dan output yang dihasilkan berupa hasil atau produk organisasi.

Kontrol Pemerintahan

Kontrol pemerintahan berkaitan erat dengan koordinasi. Kontrol pemerintahan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau kelompok masyarakat, baik internal maupun eksternal organisasi. Kontrol dapat dilakukan sebelum, sepanjang, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

Menurut Ndraha (2003) kontrol pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti : 1) pengendalian; 2) pengawasan; 3) pemantauan; 4) evaluasi program; 5) supervisi; 6) audit;

7) evaluasi kinerja (*appraisal*) dan 8) perhitungan (*Accounting*).

Selain itu, menurut Ndraha (2003) sasaran kontrol juga macam-macam, misalnya : 1) uang (*financial control*); 2) kinerja SDM organisasional; dan 3) kontrol program.

Untuk menjadi efektif sistem kontrol harus memenuhi kriteria tertentu. Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria tersebut maka semakin efektif sistem kontrolnya.

Menurut Handoko (2003) karakteristik pengawasan yang efektif dapat diperinci sebagai berikut : 1) akurat; 2) tepat waktu; 3) objektif dan menyeluruh; 4) terpusat pada titik-titik pengawasan strategis; 5) realistik secara ekonomis; 6) realistik secara organisasional; 7) terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi; 8) fleksibel; 9) bersifat sebagai petunjuk operasional; 10) diterima para anggota organisasi.

Apabila suatu kontrol pemerintahan mampu memenuhi ke-10 kriteria tersebut dengan baik maka sistem kontrolnya bisa dikatakan sudah baik. Namun apabila setiap poin diatas tidak terpenuhi atau kurang dari lima kriteria yang terpenuhi maka sistem kontrolnya bisa dikatakan buruk dan perlu segera dibenahi.

Input dari kontrol pemerintahan adalah hasil produk dari organisasi, dan outputnya adalah informasi yang akan menjadi input bagi perencanaan pemerintahan itu sendiri.

Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu

Visi Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu *Membuka Isolasi Menuju Provinsi Kalimantan Tengah Yang Sejahtera dan Bermartabat*. Sedangkan upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan harapan atau keinginan dimaksud sesuai dengan Misi Provinsi Kalimantan Tengah disusun dan difokuskan pada bidang : Infrastruktur, Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan, Pemerintahan, Hukum-Keamanan dan Hak azasi Manusia, Politik, Sosial Budaya, Kepemudaan-Kepramukaan dan Olah Raga, Kepariwisata,

Sumberdaya Alam-Lingkungan Hidup dan Tata Ruang, Perhubungan dan Telekomunikasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan (Pedoman Umum PM2L,2008).

Tujuan utama pengembangan keberdayaan masyarakat yaitu untuk pengembangan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu bagian dari strategi baru dalam percepatan pembangunan, peningkatan daya saing dunia usaha, ancaman kerusakan lingkungan, kerawanan pangan, pembangunan modal sosial (*social capital*) pasca kerusuhan dan optimalisasi modal sosial (*social capital*) sebagai sumber daya pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan-pelayanan dasar yang disediakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah seluruh Kabupaten Kota yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, pembangunan kesadaran hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perubahan pola penularan penyakit, dan tantangan-tantangan pembangunan lainnya (Profil desa/kelurahan usul lokasi PM2L tahun 2011)

Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) merupakan program terobosan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang dipusatkan di desa-desa pedalaman melalui pembangunan secara lintas sektoral dengan sasaran desa/kelurahan tertinggal. Dari sisi aspek pendanaan saat ini, dana PM2L masih bertumpu dan tersebar pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah tanpa ada kucuran dana provinsi ke kabupaten/kota secara khusus. Sementara dari aspek perencanaan, adalah , peningkatan kualitas penyusunan profil desa dengan dukungan data yang lebih lengkap melalui kerja sama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah setempat dengan Badan Pusat Statistik.(Sekilas Tentang Program Mamangun & Mahaga Lewu-PM2L atau Program Membangun dan Memelihara Desa/Kelurahan).

Desa yang direncanakan menjadi lokasi program PM2L 2011 adalah Desa yang telah ditetapkan oleh keputusan Gubernur yang tergolong Desa tertinggal/miskin. Sementara itu program tersebut tahun 2008, 2009 dan 2010 yang sudah dilaksanakan hampir di seluruh kabupaten tergolong sukses, tidak saja dilihat dari pembangunan dari partisipasi masyarakat desa serta peningkatan sosial ekonomi mereka.

Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Pengembangan Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Lokal

Otonomi daerah hendaknya tidak disikapi dengan egosentrisme yang cenderung muncul dalam keinginan untuk menguasai dan melebihi hak dari yang seharusnya. Hakikat dari otonomi daerah adalah bagaimana menjalankan pemerintahan negara dengan peran serta masyarakat sebesar-besarnya sehingga akan lebih efisien dan efektif.

Konsekuensi logis dari otonomi, adalah pendelegasian berbagai urusan yang sebelumnya menjadi urusan pusat kepada pemerintah daerah. Dasar hukum dari pengelolaan keuangan daerah adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah pasal 66 ayat 1 yang berbunyi :

“Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”

Oleh karena itu penyelenggaraan keuangan daerah harus mengacu pada asas-asas yang tercantum dalam ayat ini mencakup keseluruhan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pertanggungjawaban dan pengawasan/evaluasi. Berikut ini adalah beberapa asas dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut: 1) Asas tertib administrasi, artinya

pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus melalui pencatatan-pencatatan yang detail dan terstruktur; 2) Asas efektivitas anggaran, artinya pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus tepat guna dan berhulu pada kebutuhan masyarakat serta sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat; 3) Asas transparansi, artinya pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus selalu mentaati asas keterbukaan informasi, agar masyarakat luas bisa ikut berperan dalam melakukan kontrol; 4) Asas akuntabilitas, artinya pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan oleh para pengelolanya baik itu pertanggungjawaban secara hukum maupun pertanggungjawaban kepada publik; 5) Asas keadilan, artinya pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus selalu berkeadilan dan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat; 6) Asas manfaat, artinya pengelolaan dan pemanfaatan keuangan daerah harus bermanfaat dan dapat dirasakan langsung oleh rakyat.

4. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang ditujukan kepada masalah yang ada sekarang dan yang sedang berlaku. Adapun ciri metode ini adalah sebagai berikut: 1) Memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada sekarang; 2) Data yang dikumpulkan mula-mula disusun dan dijelaskan, kemudian dianalisis, dengan menggunakan teknis analisis tertentu; 3) Dari hasil analisis, data disimpulkan dan dapat memberikan masukan bagi objek penelitian.

Rancangan (desain) penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasusnya disini adalah Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* Rencana Aksi Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2011 Program Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Di

Kelurahan Pahandut Seberang. Rancangan penelitian studi kasus paling baik disajikan dalam bentuk cerobong (*Funnel*). Bentuk cerobong ini merupakan langkah yang sistematis, berawal dari eksplorasi yang bersifat luas dan dalam, kemudian berlanjut dengan kegiatan pengumpulan dan analisis data yang lebih menyempit dan terarah pada suatu topik tertentu. Bentuk cerobong dikatakan sistematis karena pada mulanya peneliti menjajaki tempat dan orang yang dapat dijadikan sumber data atau subjek penelitian, mencari lokasi yang dipandang sesuai dengan pengkajian, dan selanjutnya mengembangkan jaringan yang lebih luas untuk menemukan sumber data.

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Palangka Raya, studi kasus Kelurahan Pahandut Seberang. Dipilihnya Kota Palangka Raya karena Kota ini adalah merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah yang bukan tergolong Kabupaten/Kota tertinggal namun memiliki beberapa Kelurahan yang tertinggal seperti Kelurahan Pahandut Seberang.

Menurut Miles dan Huberman (1992) analisis deskriptif dilaksanakan melalui tiga alur kegiatan yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Tiga alur kegiatan itu adalah : 1) reduksi data; 2) penyajian data; dan 3) penarikan kesimpulan atau verifikasi.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.5.1 Temuan Penelitian

Dari hasil wawancara dengan informan, observasi dan dokumentasi yang diperoleh peneliti di lapangan, maka peneliti mencoba merumuskan hasil temuan-temuan ini dengan berdasarkan rumusan masalah pada Bab I yaitu:

1.5.1.1 Manajemen Pemerintahan pada Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* secara umum memang terlihat baik, tetapi kenyataan di lapangan membuktikan lain. Sejak dari perencanaan ternyata program ini bermasalah, selain itu peneliti menemukan pula beberapa

permasalahan dalam program PM2L di lapangan yang akan dirinci sebagai berikut:

A. Perencanaan Pemerintahan

1). Perencanaan program PM2L mulai dari Desa/Kelurahan hingga ke tingkat Kabupaten/Kota tidak dapat lepas dari unsur politis;

Kadang-kadang beberapa kegiatan dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena perencanaan bersifat politis. (Drs. Masubur P. I. Tupak)

Saat ini seorang Kepala Desa dipilih melalui pemilihan langsung. Apabila Kepala Desa sudah terpilih maka ia akan mengutamakan daerah yang memilihnya dan akan meninggalkan daerah yang tidak memilihnya. (Drs. Mihing, SH, M.Si)

belum tentu MUSRENBANG di tingkat Desa/Kelurahan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat, karena yang hadir tidak semua masyarakat namun hanya perwakilan RT,RW, BPD, Tokoh Masyarakat yang kemungkinan besar adalah pendukung dari kepala desa yang terpilih. (James. B. Simatupang, M.Si)

2). Perencanaan program PM2L kadangkala tidak melibatkan aparat Desa/Kelurahan, karena lebih dominan menggunakan pola *top down*; *biasanya lebih banyak bersifat top down terserah Dinas dan SKPD mau kasih program apa, kita (Kelurahan Pahandut Seberang) juga kadang tidak dilibatkan.* (Wiliam)

- Sistem perencanaannya lebih dominan top down daripada bottom up.* (James. B. Simatupang, M.Si)
- 3). Perencanaan program PM2L terkesan hanya disusun di atas meja tanpa melalui survey lapangan yang komprehensif *Perencanaannya belum matang betul, kelemahannya karena kurang survey lapangan.* (Drs. Mihing, SH, M.Si)
...dari sistem perencanaan top down ada kesan program hanya dibuat diatas meja tanpa survey lapangan terlebih dahulu. (James. B. Simatupang, M.Si)
- B. Pengorganisasian dikeluhkan lemahnya koordinasi antar pelaku organisasi program.
Kami tidak dilapori progress dari program PM2L yang sudah berjalan, kecuali kami mencari tahu sendiri, padahal program itu berlangsung di wilayah kerja kami. (Wiliam)
- C. Penggunaan sumber-sumber pemerintahan dikeluhkan kurang kuatnya asas legalitas program PM2L, karena hanya diperkuat oleh Peraturan Gubernur.
saat ini Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu dilegalisasi dengan Surat Keputusan Gubernur dimana apabila Gubernur Kepala Daerah telah memasuki masa purna tugas maka program ini otomatis berakhir pula.
- A. Kontrol pemerintahan harus sudah cukup efektif karena faktor jarak Kelurahan Pahandut Seberang yang tidak begitu jauh dengan Pusat Pemerintahan.
kontrol pemerintahan sudah diatur dalam Peraturan Gubernur No. XIV Tahun 2011. Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kalteng diserahi tugas pembinaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi sedangkan audit finansial (keuangan) dilakukan oleh Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan. (James. B. Simatupang, M.Si)
- 1.5.1.2 Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi dalam Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu. Untuk lebih jelasnya akan penulis kategorikan sebagai berikut:
- A. Faktor-faktor berupa hambatan dalam Program PM2L
- 1). Kurangnya perhatian pemerintah pusat terhadap Desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah.
...kurangnya perhatian (Pemerintah Pusat) terhadap desa-desa tertinggal. (James. B. Simatupang, M.Si).
....apalagi desa yang ada di Kalteng relatif banyak dan hampir 80% penduduk Kalteng tinggal di desa selain itu kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap desa-desa tertinggal. (Drs. Mihing, SH, M.Si)
- 2). Kebanyakan lokasi Desa Tertinggal sangat terpencil;
...pedesaan yang terisolir dan terpencil (cukup banyak). (Drs. Mihing, SH, M.Si)
- 3). Sebelum ini belum ada program pemberdayaan yang mampu menyentuh sektor riil;
...program telah dilaksanakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa-desa tertinggal, namun hal tersebut tidak bisa maksimal karena tidak mampu menyentuh sektor riil yang langsung memberdayakan masyarakat. (Drs. Mihing, SH, M.Si)

- 4). Pada tahap awal penyusunan program PM2L banyak Kabupaten/Kota yang tidak serius menunjukkan apakah desa yang diusulkan benar tertinggal atau tidak;
...seperti ada Kabupaten/Kota yang pada tahap awal-awal Program PM2L tidak benar-benar nampak serius menunjukkan Desa/Kelurahan yang diusulkan benar tertinggal atau tidak. (James. B. Simatupang, M.Si)
- 5). Desa-desa tertinggal tidak memiliki data Profil Desa yang lengkap.
...ternyata profil desa yang lengkap sangat sulit didapat dari Desa / Kelurahan tertinggal, bahkan kita anggap 'barang langka'. (Drs. Mihing, SH, M.Si)
- B. Faktor-faktor berupa tantangan;
- 1). Desa/Kelurahan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 1.356 Desa/Kelurahan dan 978 Desa/Kelurahan diantaranya dikategorikan tertinggal;
...terdiri dari 14 Kabupaten/ Kota (7 diantaranya Kabupaten Tertinggal) 107 Kecamatan dan 1.356 Desa/Kelurahan dan 978 Desa/Kelurahan diantaranya dikategorikan tertinggal. (Pedoman Umum PM2L, 2008)
- 2). Banyak warga Desa yang tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia;
Agar program ini bisa diterima dengan baik di pedesaan yang terisolir dan terpencil maka diganti namanya menggunakan kosakata lokal (Bahasa Dayak) yaitu Program Mamangun tuntang Mahaga Lenvu (PM2L).
- (James. B. Simatupang, M.Si)
- 3). Banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa-desa tertinggal kurang maksimal;
...namun hal tersebut tidak bisa maksimal karena tidak mampu menyentuh sektor riil yang langsung memberdayakan masyarakat. (Drs. Mihing, SH, M.Si)
- 4). Pada tahap awal banyak Desa/Kelurahan yang tidak benar-benar tertinggal mendapat alokasi program PM2L;
...mengakibatkan Desa/Kelurahan yang tergolong tidak tertinggal juga mendapat Program PM2L. (James. B. Simatupang, M.Si)
- 5). Aparat Desa/Kelurahan terpencil belum terampil membuat dan menyusun Data Profil Desa.
...ternyata profil desa yang lengkap sangat sulit didapat dari Desa/ Kelurahan tertinggal (karena Aparat Desa belum terampil menyusun Profil Desa) (Drs. Mihing, SH, M.Si)
- C. Solusi dalam menanggulangnya.
- 1). Dicanangkan program Bedah Desa pada tahun 2006 di Desa Tumbang Tarusan Kabupaten Katingan;
...dicanangkan program Bedah Desa tahun 2006 di Desa Tumbang Tarusan Kabupaten Katingan. (James. B. Simatupang, M.Si)
- 2). Diganti namanya menggunakan kosakata lokal (Bahasa Dayak) yaitu Program Mamangun tuntang Mahaga Lenvu (PM2L);
Agar program ini bisa diterima dengan baik di pedesaan yang terisolir dan

terpencil maka diganti namanya menggunakan kosakata lokal (Bahasa Dayak) yaitu Program Mamangun tuntang Mahaga Lewu (PM2L).(James. B.

- 3). Mensinergikan program pembangunan daerah dan sektoral serta mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu; ...dengan mensinergikan program pembangunan daerah dan sektoral serta mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu agar masyarakat lebih sejahtera dan mandiri. (Drs. Mihing, SH, M.Si)

- 4). disempurnakan dengan menambah Data Profil Desa sebagai acuan pendukung; ...pada akhirnya kita sempurnakan, kita libat dari profil desanya sebagai penguat data...(James. B. Simatupang, M.Si)

- 5). Dikirim pemuda terdidik yang berdayakan dan dilatih oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran program PM2L.

Pada saat Rakor (rapat koordinasi) akhirnya kita putuskan untuk mengirim pemuda terdidik yang kita berdayakan dan kita latih di Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran program

PM2L.(Drs. Mihing, SH, M.Si)

1.5.2 Pembahasan

A. Perencanaan Pemerintahan bersifat politis

Secara umum Handoko (2003) membagi perencanaan kedalam dua tipe utama yaitu: (1) perencanaan strategik (*strategic plans*); dan (2) perencanaan operasional (*operational plans*) seperti yang telah dijabarkan pada Bab II. Tapi pada kenyataannya di Kelurahan Pahandut Seberang ada tipe perencanaan yang ke-3 yaitu perencanaan politis.

Perencanaan strategik (*strategic plans*), dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasional yang lebih luas atau mengimplemetasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaan suatu organisasi dan perencanaan operasional (*operational plans*) yang mengurai lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai, sedangkan Perencanaan politis mengeliminasi keduanya. Maksudnya dengan perencanaan yang bersifat politis ini maka dua tipe perencanaan ini otomatis tidak ada artinya lagi.

Salah satu aspek penting dari perencanaan pemerintahan adalah pembuatan keputusan. Dimana keputusan-keputusan penting harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Namun apabila perencanaan program sudah bersifat politis maka keputusan-keputusan yang dibuat dipastikan akan bermuatan politis.

Dengan adanya perencanaan yang bersifat politis ini secara langsung akan berdampak serius terhadap Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu di Kota Palangka Raya. Dampak yang akan dirasakan seperti: Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu yang dilaksanakan tidak tepat sasaran, hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja dan yang paling utama yaitu tidak terurainya akar permasalahan utama dari kemiskinan.

B. Perencanaan Pemerintahan Lebih dominan *top down*

Input dari perencanaan pemerintahan berasal dari informasi dan aspirasi masyarakat. Sedangkan output yang dihasilkan adalah sebuah rencana target dari kegiatan itu (Ndraha, 2003). Pada program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) rencana target ini diwujudkan dalam sebuah dokumen rencana aksi.

Kenyataannya dalam program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) di Kelurahan Pahandut Seberang perencanaan pemerintahan tidak mengakomodir input dari masyarakat, buktinya hasil Musrenbang Kelurahan Pahandut Seberang tidak dimasukkan dalam rencana aksi program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) Kota Palangka Raya dengan berbagai alasan.

Program prioritas yang ada terkesan hanya disusun tanpa analisis kebutuhan masyarakat. Padahal aspek perencanaan sangatlah penting, karena tanpa perencanaan yang baik maka akan sulit bagi pemangku kebijakan untuk mengambil keputusan-keputusan yang tepat dalam setiap tahapan program. Selain itu juga memudahkan dalam melakukan koordinasi antar berbagai bagian organisasi serta meminimalisir program yang tidak tepat sasaran dan kurang termanfaatkan dengan baik.

C. Perencanaan yang tidak melalui analisis kebutuhan

Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, tetapi rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Namun tetap yang paling mendasar adalah perencanaan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan informan penelitian pada program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) ditemukan bahwa perencanaan yang ada saat ini terkesan tidak tepat sasaran. Hal

ini disebabkan karena perencanaan tersebut terkesan hanya disusun seadanya tanpa survey dan analisis kebutuhan yang komprehensif.

Sementara itu suatu program tidak akan maksimal apabila tidak dapat mengakomodir kepentingan masyarakat yang menjadi objeknya. Masyarakatlah yang paling tahu apa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu mereka harus dilibatkan dalam setiap penyusunan perencanaan baik melalui mekanisme Musrenbang maupun mekanisme lain yang memungkinkan keterlibatan lebih luas dari masyarakat itu sendiri.

D. Lemahnya Koordinasi Antar Pelaku Organisasi PM2L

Input yang dijadikan acuan dalam penyusunan struktur organisasi pemerintahan adalah rencana target, dan yang menjadi outputnya adalah organisasi sumberdaya. Suatu sumber daya, baik sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya barang sebelum digunakan harus diorganisasikan terlebih dahulu agar siap pakai contoh: sumber daya *waktu*, setelah diorganisasikan akan menjadi *jadwal* kegiatan, sumber daya *uang* setelah diorganisasikan akan menjadi susunan *anggaran* dan lain-lain.

Dalam rangka memantapkan pelaksanaan program *Mamangun tuntang Mahaga Lewu* (PM2L) di Kota Palangka Raya perlu ditingkatkan koordinasi dan keterpaduan lintas pelaku dan melibatkan banyak pihak seperti: Pemerintah Daerah, Lembaga Kemasyarakatan, dan masyarakat sehingga menjadi satu kegiatan yang terpadu (Pedoman Umum PM2L, 2008).

Salah satu temuan penelitian ini yaitu lemahnya koordinasi antar pelaku organisasi PM2L. Hal ini terjadi karena belum maksimalnya SKPD menyerap dan mengaplikasikan program PM2L. Akibatnya Program PM2L dan program pemberdayaan lainnya berjalan sendiri-sendiri dan kadangkala ada tumpang tindih. Hal ini akan berdampak kurang

baik bagi Pemerintah Daerah itu sendiri.

E. Kurang Kuatnya Asas Legalitas PM2L

Penggunaan sumber-sumber pemerintahan memiliki berbagai subfungsi, seperti komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan (Ndraha, 2003). *Actuating* yang efektif memerlukan komunikasi, koordinasi dan kepemimpinan yang baik. Untuk mencapai tujuan dari organisasi dan menjamin kesesuaian antara target dengan hasil yang ingin dicapai maka perlu adanya tiga komponen tersebut.

Kurang kuatnya asas legalitas program PM2L dirasakan jadi kendala yang suatu saat akan dihadapi ketika terjadi pergantian kepala daerah, karena belum tentu kepala daerah berikutnya memiliki komitmen yang sama dalam paradigma pembangunannya.

Oleh karena itu untuk mencapai suatu kepemimpinan yang kuat menurut ndraha (2003) maka diperlukan penguatan legalitas terlebih dahulu.

F. Kontrol Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003) kontrol pemerintahan dapat dilakukan dengan berbagai teknik seperti : 1) pengendalian; 2) pengawasan; 3) pemantauan; 4) evaluasi program; 5) supervisi; 6) audit; 7) evaluasi kinerja (*appraisal*) dan 8) perhitungan (*Accounting*).

Selain itu, menurut Ndraha (2003) sasaran kontrol juga macam-macam, misalnya : 1) uang (*financial control*); 2) kinerja SDM organisasional; dan 3) kontrol program.

Kontrol pemerintahan berkaitan erat dengan koordinasi. Kontrol pemerintahan dapat dilakukan oleh siapa saja yang berkepentingan terhadap suatu organisasi atau kelompok masyarakat, baik internal maupun eksternal organisasi. Kontrol dapat dilakukan sebelum, sepanjang, dan sesudah kegiatan dilaksanakan.

Di Kelurahan Pahandut Seberang yang jaraknya tidak terlalu jauh dengan pusat Kota Palangka Raya memungkinkan kontrol yang efektif sesuai dengan pengakuan dari Lurah Pahandut Seberang.

G. Faktor-faktor berupa Hambatan, Tantangan dan Solusi

Hambatan yang pertama yaitu kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap Desa-desa tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah, sementara tantangannya Desa/Kelurahan tertinggal dan miskin di Provinsi Kalimantan Tengah cukup banyak, solusinya dicanangkan program Bedah Desa pada tahun 2006 di Desa Tumbang Tarusan Kabupaten Katingan. Masalah teratasi dengan baik dan program berjalan maksimal.

Hambatan yang kedua kebanyakan lokasi Desa tertinggal sangat terpencil, tantangannya banyak warga Desa terpencil yang tidak dapat menggunakan Bahasa Indonesia , solusinya Program Bedah Desa diganti namanya menggunakan kosakata lokal (Bahasa Dayak) yaitu Program *Mamangun tuntang Mahaga Lewu* (PM2L). Solusi penggunaan kosakata lokal dirasakan peneliti sangat tepat untuk lebih mendekatkan program PM2L, membangun kebersamaan dan rasa memiliki yang lebih kuat.

Hambatan yang ketiga program pemberdayaan masyarakat tidak mampu menyentuh sektor riil, tantangannya banyak program untuk meningkatkan kesejahteraan di Desa-desa tertinggal kurang maksimal, solusinya mensinergikan program pembangunan daerah dan sektoral serta mendorong partisipasi masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah melalui Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu*. Masalah teratasi dengan baik.

Hambatan yang keempat pada tahap awal penyusunan program PM2L banyak Kabupaten/Kota yang tidak serius menunjukkan apakah desa yang diusulkan benar tertinggal atau tidak, tantangannya pada tahap awal banyak

Desa/Kelurahan yang tidak benar-benar tertinggal mendapat alokasi program PM2L. solusinya pada akhirnya disempurnakan dengan menambah Data Profil Desa sebagai acuan pendukung. Masalah belum teratasi maksimal

Hambatan yang kelima data Profil Desa yang lengkap sangat sulit didapat dari Desa/ Kelurahan tertinggal, tantangannya aparat Desa/Kelurahan terpencil belum terampil membuat dan menyusun data Profil Desa, maka solusinya dikirim pemuda terdidik yang berdayakan dan dilatih oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Kalimantan Tengah untuk mendampingi Desa/Kelurahan yang menjadi sasaran program PM2L. Sampai sejauh ini pengamatan dilapangan masih berjalan cukup baik.

6. Kesimpulan

Kesimpulan

Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* sejatinya merupakan program yang digagas dan dipelopori oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengentaskan kemiskinan. Program ini sejalan dengan visi dan misi pembangunan Kalimantan Tengah yaitu menjadi daerah yang maju dan bermartabat. Semua ini bisa dicapai apabila masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Provinsi Kalimantan Tengah sejahtera.

Penelitian sudah dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan studi kasus terhadap Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* Program Prioritas Pemberdayaan Ekonomi Rakyat dari Pemerintah Kota Palangka Raya di Kelurahan Pahandut Seberang. Dari hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Program *Mamangun Tuntang Mahaga Lewu* ternyata belum berjalan maksimal karena bermasalah sejak dari perencanaan program.

Dari penelitian ini penulis menelaah dengan seksama untuk mencoba merumuskan saran yang akan diberikan dengan harapan Program *Mamangun*

Tuntang Mahaga Lewu bisa lebih baik lagi ke depannya, bermanfaat dan termanfaatkan serta bisa menjadi *rule models* bagi program pemberdayaan masyarakat yang ada. Saran yang penulis paparkan ini adalah hasil dari pengamatan, wawancara, analisis data pendukung yang diharapkan mampu menjadi masukan yang baik. Saran penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap daerah hendaknya disikapi dengan bijaksana yaitu dengan mengembangkan kemampuan dan kreativitas Daerah dalam memberdayakan masyarakatnya.
2. Manajemen Pemerintahan dimulai dari tahap perencanaan, artinya apabila perencanaan berjalan baik maka fungsi manajemen yang lain akan mengiringi.
3. Setiap pemimpin yang baik harus bersikap negarawan demi mensejahterakan masyarakat hendaknya Program PM2L dipisahkan dari kepentingan politik dan golongan apapun.
4. Lemahnya koordinasi harus disikapi dengan lebih aktifnya para pelaku kerja PM2L mencari informasi dan melaporkan kepada tim evaluasi apabila memang dirasa perlu.
5. Penulis merasa perlu apabila program PM2L diperkuat dengan sebuah Peraturan Daerah, karena apabila tidak dibuat maka setelah Gubernur berganti maka program ini dengan sendirinya akan berakhir pula. Padahal program PM2L sudah cukup dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di Kalimantan Tengah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 1997. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bogdan, Robert & Steven J. Taylor, 1992. *Introductions to Qualitative Research Methods* diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Arief Furchan. Surabaya: Usaha Nasional.

- Bogdan, Robert C. & Biklen, K.S., 1992. Riset Kualitatif Untuk Pendidikan: Pengantar ke Teori dan Metode. Diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Munandir, Jakarta: Dirjen Dikmenti.
- Ellis, Frank, 1998. *Household Strategies and Rural Livelihood diversification*. The Journal of Development Studies, Vol 35, No.1.
- Handoko, T. Hani, 1997. *Manajemen* edisi II. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Ife, Jim, 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice*. Australia: Longman.
- Jones, Howard, 1990. *Social Welfare in Third World Development*. London: Macmillan.
- Kieffer, C. H, 1984. *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service*, Vol.3, USA.
- Lincoln, S, & Guba, G, 1985. *Naturalistic Inquiry*. London: Sage Publication Inc.
- Marjuki dan Edi Suharto, 1996. *Perubahan Sosial dan Perubahan Sosial*. Bandung: STKS.
- Miles, B. M & Huberman, A.M, 1992. *Analisis Data Kualitatif. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moleong, M.L, 1992. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology: Ilmu Pemerintahan Baru* Edisi I. Jakarta: Rineka Cipta.
- Narang, Agustin T, 2004. *Regulasi Bagi Perkembangan Perekonomian Daerah*. Jakarta: ATN Centre.
- _____. Pedoman Umum PM2L (Program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Parson, Ruth J., James D. Jorgensen dan Santos H. Hernandez, 1994. *The Integration of Social Work Practice*. California : Brook/Cole.
- Rappaport, J., 1984, *Studies In Empowerment: Introduction to the Issue Prevention In Human Issue*. USA.
- _____. Sekilas Tentang Program Mamangun & Mahaga Lewu-PM2L atau Program Membangun dan Memelihara Desa/Kelurahan. 2008. Palangka Raya: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- Suharto, Edi, 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Surachmad, W, 1985. *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*. Jakarta: Tarsito
- Supriyanto, Budi, 2009 *Manajemen Pemerintahan (Plus Dua Belas Langkah Strategis)*. Tangerang: Media Brilian.
- Swasono, Sri-Edi, 2004. *Kebersamaan dan Asas Kekeluargaan*. Jakarta: UNJ Press
- Syafi'I, H.M., 2009. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Malang: Averroes Press.
- Terry, 1988. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara